

Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kepulauan Riau

¹Agusnuli Ayu Zizi, ²Ayunatasya, ³Leonardo Samosir

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: ayuziziagusnuli@gmail.com

Kata kunci

Efektivitas, Stunting, Dinas Kesehatan.

Abstrak

Stunting merupakan suatu bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita yang berakibat dari akumulasi adanya ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung mulai dari kehamilan sampai pada usia 24 bulan. Adanya ketidakcukupan nutrisi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan kematian. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan melakukan tindak spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting. Metode yang dilakukan yakni melalui studi literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program percepatan penurunan stunting sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun terdapat faktor penghambat pada kurangnya Pendidikan, ekonomi, dan kurangnya pengetahuan pola asuh anak.

Keywords

Effectiveness, Stunting, Public Health Office.

Abstract

Stunting is a form of growth and development failure that causes linear growth disorders in toddlers which results from the accumulation of nutritional insufficiency that lasts from pregnancy to 24 months of age. The existence of inadequate nutrition in childrens growth and development at an early age will hinder physical development, hinder childrens mental development, and even death. The provincial government of the Riau Island through the health office is taking specific actions in dealing with problems and preventing stunting. The method used is through the study of literature related to research problems. The results of this study indicate that the effectiveness of the stunting reduction acceleration program has been carried out properly in accordance with the provisions and objectives that have been set. However, there are inhibiting factors in the lack of education, economy, and lack of knowledge of parenting.

Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang sangat penting untuk diperhatikan, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan suatu bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita yang berakibat dari akumulasi adanya ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung mulai dari kehamilan sampai pada usia 24 bulan. Adanya ketidakcukupan nutrisi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan

fisik, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan kematian. Balita yang mengalami masalah stunting akan memiliki risiko terjadinya kerusakan secara permanen pada perkembangan kognitif yang diikuti oleh perkembangan intelektual, motorik yang kurang optimal, dan kemampuan bahasa.

Anak dengan status gizi stunting akan mengalami gangguan pertumbuhan hingga masa remaja sehingga pertumbuhan akan lebih rendah dibandingkan dengan remaja normal. Remaja yang terdampak stunting akan berisiko mendapatkan penyakit kronik salah satunya yakni obesitas. Remaja stunting akan berisiko lebih tinggi terkena obesitas dibandingkan dengan remaja yang tinggi badannya normal. Obesitas dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang terjadi melalui ketidakseimbangan antara pola makan, perilaku makan dan aktivitas fisik.

Percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi suatu isu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Permasalahan ini juga harus mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat dikarenakan permasalahan ini sangat berkaitan dengan kemiskinan yang berhubungan dengan masalah Kesehatan pangan di tingkat rumah tangga serta menyangkut perilaku tentang hidup sehat. Apabila masalah stunting dan masalah gizi tidak ditangani dengan serius maka diperkirakan Indonesia akan kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2-3% setiap tahunnya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 menunjukkan bahwa Balita yang menderita stunting mencapai 30,8%, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 27,67%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka stunting di Indonesia selama ini belum menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Efektivitas diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan suatu tugas yang dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang diperlukan untuk itu. (Indrawijaya, 2014: 175-176)

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah menetapkan 160 Kabupaten/Kota yang menjadi daerah prioritas dalam penanganan stunting yang melingkupi 1.600 desa. Berdasarkan data, di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai angka 15,4%. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan stunting melalui peningkatan gizi masyarakat dengan melakukan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak.

Tabel 1. Presentase Balita Pendek dan Sangat Pendek Menurut Provinsi

Provinsi	Prevalensi Stunting Berdasarkan provinsi			
	2019	2020	2021	2022
Nusa Tenggara Timur	43,82%	42,99%	37,8%	35,3%
Sulawesi Barat	40,38%	40,44%	33,8%	35%
Papua	29,36%	28,05%	29,5%	34,6%
Nusa Tenggara Barat	37,85%	38,15%	31,4%	32,7%
Aceh	34,18%	33,01%	33,2%	31,2%
Papua Barat	24,58%	23,42%	26,2%	30%
Sulawesi Tengah	31,26%	29,66%	29,7%	28,2%

Kalimantan Barat	31,46%	30,90%	29,8%	27,8%
Sulawesi Tenggara	31,44%	29,76%	30,2%	27,7%
Sulawesi Selatan	30,59%	29,28%	27,4%	27,2%
Kalimantan Tengah	32,30%	30,48%	27,4%	26,9%
Maluku Utara	29,07%	27,23%	27,5%	26,1%
Maluku	30,38%	27,94%	28,7%	26,1%
Sumatera Barat	27,47%	26,71%	23,3%	25,2%
Kalimantan Selatan	31,75%	30,93%	27,4%	24,6%
Kalimantan Timur	28,09%	27,49%	22,8%	23,9%
Gorontalo	34,89%	32,72%	29,0%	23,8%
Kalimantan Utara	26,25%	25,76%	27,5%	22,1%
Sumatera Utara	30,11%	28,70%	25,8%	21,1%
Jawa Tengah	27,68%	26,90%	20,9%	20,8%
Sulawesi Utara	21,18%	19,73%	21,6%	20,5%
Jawa Barat	26,21%	25,55%	24,5%	20,2%
Banten	24,11%	21,84%	24,5%	20%
Bengkulu	26,86%	25,43%	22,1%	19,8%
Jawa Timur	26,86%	25,64%	23,5%	19,2%
Sumatera Selatan	28,98%	28,68%	24,8%	18,6%
Kep Bangka Belitung	19,93%	20,94%	18,6%	18,5%
Jambi	21,03%	19,59%	22,4%	18%
Riau	23,95%	22,43%	22,3%	17%
DI Yogyakarta	21,04%	19,88%	17,3%	16,4%
Kepulauan Riau	16,82%	13,72%	17,6%	15,4%
Lampung	26,26%	24,40%	18,5%	15,2%
DKI Jakarta	19,96%	19,24%	16,8%	14,8%
Bali	14,42%	13,68%	10,9%	8%

Sumber: Pemantauan Status Gizi Kesehatan Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Berdasarkan data diatas, angka stunting mengalami penurunan sebanyak 11,4% dari 24,4% ditahun 2021 menjadi 21,6%. Angka ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah bali, DKI Jakarta, dan lampung. Sesuai dengan target Nasional dalam Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan stunting, Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penurunan prevalensi stunting pada 14% di tahun 2024. Hal ini didasarkan pada lima pilar percepatan penurunan stunting, yang akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga beresiko stunting.

Tabel 2. Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kota/Kabupaten	Prevalensi Stunting			
		2019	2020	2021	2022
1.	Lingga	16,49%	11,2%	25,4%	18,9%
2.	Natuna	17,36%	11%	17,8%	18%

3.	Bintan	24,37%	11%	20%	17,8%
4.	Tanjung Pinang	21,69%	1,3%	18,8%	15,7%
5.	Batam	15,88%	7,2%	17,5%	15,2%
6.	Kepulauan Anambas	12,54%	15,6%	21,7%	14%
7.	Karimun	15,08%	7%	17,6%	13,3%

Sumber: Status Gizi Kesehatan Indonesia (SSGI)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa prevalensi Balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga yakni sebesar 18,9% dan yang terendah di Kabupaten Karimun sebesar 13,3%. Keberhasilan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan peran dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam penanganan stunting sesuai yang diamanatkan pada Perpres 72 Tahun 2021. Penanganan stunting dilakukan dengan melibatkan OPD yang dimana sektor ini memberikan kontribusi 70% dalam upaya penurunan stunting. Selain itu juga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan tindakan spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting.

Berdasarkan pemaparan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kepulauan Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kepulauan Riau.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur. Menurut Zed (dalam Eka Diah Kartiningrum, 2015:4), metode studi literatur ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah, *literature review* yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Dalam proses penganalisa dapat dimulai dari materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Tahun 2020, penduduk provinsi Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km² dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum memiliki nama. Adapun jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Karimun	253.457
2.	Kabupaten Bintan	159.518
3.	Kabupaten Natuna	81.495
4.	Kabupaten Lingga	98.633
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	47.402
6.	Kota Batam	1.196.396
7.	Kota Tanjungpinang	277.663
Total		2.064.564

Sumber: BPS Kepulauan Riau (2021)

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat hanya 130,92 juta jiwa penduduk Kepri yang berpendidikan hingga perguruan tinggi. Rincian mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Jenjang	Nilai/Jiwa
1.	S3	198
2.	S2	3.917
3.	S1	84.217
4.	D3	33.701
5.	D1 dan D2	8.885
6.	SLTA	580.673
7.	SLTP	207.134
8.	Tamat SD	272.640
9.	Belum Tamat SD	239.261

10.	Tidak/Belum Sekolah	624.652
-----	---------------------	---------

Sumber: Databoks (2021)

Kemudian berdasarkan pekerjaan, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terdapat masyarakat yang bukan angkatan kerja, dimana secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja

No.	Wilayah	Bukan Angkatan Kerja					Jumlah Bukan Angkatan Kerja
		Belum Bekerja	Mengurus Rumah Tangga	Pelajar Mahasiswa	Pensiunan	Lainnya	
1.	Bintan	42.947	37.148	29.386	774	15	110.270
2.	Karimun	55,268	62,155	56,360	922	23	174,728
3.	Natuna	18,819	18,142	17,460	273	3	54,697
4.	Lingga	26,986	22,643	16,356	338	2	66,325
5.	Kepulauan Anambas	12,864	10,362	8,140	106	6	31,478
6.	Kota Batam	326,599	173,142	183,215	991	39	683,986
7.	Kota Tanjungpinang	54,371	45,061	44,325	1,732	26	145,515
Provinsi Kepulauan Riau		537,854	368,653	355,242	5,136	114	1,266,999
Presentase (%)		26	18	17	0.25	0.01	62

Sumber: PPID Provinsi Kepulauan Riau (2021)

B. Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kepulauan Riau

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yakni effective yang memiliki arti berhasil atau suatu tindakan keberhasilan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, 2014:96)

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes RI 2011).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa aspek untuk mengukur tingkat efektivitas program. Program ini dapat dinyatakan berhasil atau efektif apabila fungsi serta tugas implementor terlaksana dengan maksimal. Implementor atau pelaksana pada program percepatan penurunan stunting ini adalah pihak puskesmas. Kemudian pihak puskesmas akan turun langsung ke posyandu dan menunjuk kader PMT berdasarkan usulan dari bidan desa. Kader PMT ini dibutuhkan untuk mengatasi hal pada penurunan stunting. Apabila posyandu tidak memiliki kader yang handal dalam mengatasi stunting maka akan terjadi kurang efektifnya penurunan stunting.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh kader PMT yang akan memberikan makanan tambahan kepada bayi yang termasuk dalam kategori stunting selama tiga bulan. Selain itu juga, pihak puskesmas akan melakukan kerja sama dengan bidan desa dan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui juga ibu yang memiliki anak balita tentang pentingnya memperhatikan gizi anak.

Program percepatan penurunan stunting telah dijalankan dengan baik karena pihak puskesmas telah bekerja sama dengan petugas gizi, dinas kelautan dan perikanan, dinas perkim terkait penyediaan air bersih, bidan desa dan juga kader untuk menjalankan program ini terkhususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat kendala lain dalam hal ini yakni kurangnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan jumlah kader PMT yang belum memadai. Meskipun penurunan angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai pada urutan empat terendah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan upaya preventif dalam pencegahan stunting.

1. Aspek Rencana dan Program

Apabila kegiatan atau program yang dibuat oleh kader PMT dapat dilaksanakan dengan baik, maka rencana atau program dapat dikatakan efektif. Upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya dengan pemberian F100 pada balita kasus gizi buruk, pemberian tablet Fe, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, makanan tambahan pada ibu hamil, imunisasi dasar lengkap, dan pemberian makanan tambahan (PMT) balita.

2. Aspek Ketentuan dan Program

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatan. Program percepatan penurunan stunting di Kepulauan Riau dilakukan secara rutin oleh tiap posyandu dengan memberikan tablet tambah darah, pemberian vitamin A pada balita, dan pemberian makanan tambahan.

Salah satu SOP yang dijadikan acuan dalam program ini adalah terkait dengan SOP tentang pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dalam rangka penurunan stunting yang meliputi:

- a. Balita datang ke Posyandu.
- b. Petugas melakukan pengukuran tinggi badan.
- c. Petugas melakukan pencatatan tinggi badan.
- d. Petugas memasukkan data penilaian status gizi sesuai dengan standar WHO.
- e. Petugas melaporkan hasil penilaian status gizi stunting.

3. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Suatu program dapat dikatakan efektif dari sisi hasil, apabila tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Kondisi ideal ini menyangkut pada program percepatan penurunan stunting. Pada Provinsi Kepulauan Riau sudah dapat dikatakan baik karena telah memasuki urutan empat terendah se-Indonesia. Jika dilihat berdasarkan SGGI stunting yang terjadi di Kepulauan Riau sebesar 21,6% dan telah mengalami penurunan 11,4% dari tahun 2021. Balita stunting masih ada dikarenakan perhatian orang tua yang masih membiarkan anaknya sering makan makanan ringan yang membuat pemberian makanan tambahan kurang diminati oleh anak-anak. Di samping itu, banyak orang tua yang masih menganggap bahwa jika anaknya aktif maka dia dalam kategori sehari meskipun makanannya tidak teratur dan tidak bergizi.

Efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kepulauan Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya:

1. Faktor Pendukung

Adanya koordinasi dan Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan dinas PU dan dinas Perkim terkait penyediaan akses air bersih, koordinasi dan Kerjasama dengan dinas PP dan KB terkait layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, Kerjasama dengan dinas ketahanan pangan, bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan upaya dengan pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk, mengadakan pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang melalui sweeping, pemberian PMT, pemberian tablet FE, dan melakukan konseling pra nikah kepada calon pengantin.

2. Faktor Penghambat

- a. Pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang rendah juga menjadi penghambat pada program ini dikarenakan baik atau tidaknya cara mendidik anak dipengaruhi oleh Pendidikan orang tuanya. Banyaknya pernikahan usia dini membuat anak tidak terjaga pola asuh dan asupan gizi. Disamping itu, kader PMT hanya bertugas memberikan makanan tambahan kepada anak balita tiga kali sehari

selama tiga bulan selebihnya asupan gizi anak akan diatur oleh orang tua terutama ibu.

- b. Faktor ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting karena peningkatan gizi balita hanya mengandalkan pemberian makanan tambahan dari kader PMT yang seharusnya kebutuhan nutrisi anak harus didapatkan lebih dari itu.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak. Faktor pengetahuan terkait pola asuh anak sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penurunan stunting. Kurangnya pengetahuan orang tua disebabkan jaranganya atau kurang tertariknya orang tua untuk mengikuti sosialisasi.

Simpulan

Efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pertama, aspek rencana atau program: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk menangani permasalahan dan pencegahan stunting dengan memberikan F100 pada balita kasus gizi buruk, pemberian tablet Fe, tablet tambah darah pada ibu hamil, makanan tambahan pada ibu hamil, imunisasi dasar lengkap, dan pemberian makanan tambahan (PMT) balita. Kedua, aspek ketentuan dan peraturan: program yang dilakukan secara rutin oleh setiap posyandu dengan memberikan tablet tambah darah, pemberian vitamin A pada balita, dan pemberian makanan tambahan. Selain itu terdapat SOP tentang pemantauan pertumbuhan bayi dan balita yang dijadikan sebagai acuan. Ketiga, aspek tujuan atau kondisi ideal: Provinsi Kepulauan Riau berhasil menurunkan angka stunting dengan memasuki urutan ke-4 terendah kasus stunting se-Indonesia. Berdasarkan SGGI stunting yang terjadi di Kepulauan Riau sebesar 21,6% dan telah mengalami penurunan 11,4% dari tahun 2021. Selain itu, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya ialah adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi dengan Dinas PU dan Dinas Perki, terkait penyediaan akses air bersih, koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PP dan KB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya pendidikan bagi orang tua, ekonomi keluarga balita stunting, dan kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak.

Referensi

- BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2021) *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka (Kepulauan Riau Province in Figures) 2021*. Tanjungpinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literature review; panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12-12.
- Diah, K. E. (2019). PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR.”.

- Faizah, A., Silalahi, R. D., Nasution, N., & Bakri, H. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Dengan Optimalisasi Peran Posyandu. *Jurnal Abdi Mecusuar*, 2(1), 59-72.
- Haqiqi, F., Novita, F., Sebayang, D. M., Yusmalina, Y., & Banowati, R. (2023). PENGARUH SOSIAL EKONOMI DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA. *JURNAL CAFETARIA*, 4(1), 130-139.
- Indrawijaya, A. I. (2014). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartiningrum, E. D. (2015). *Panduan penyusunan studi literatur*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto, 1-9.
- Munawaroh, Z., Nazaki, N., & Winarti, N. (2022). Dampak pelaksanaan program stunting di kota Tanjungpinang (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Mutiarin, D., & Arif, Z. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10-21.
- Pratiwi, D. A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA BATAM. *Jurnal EL-RIYASAH*, 14(1), 15-29.
- Riyadh, N. A., Batara, A.s., & Nurlinda, A. (2023). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(1), 1-17.
- Rozi, M. F., Fadilah, A., Melfan, S. N., Akhyar, M., & Gurning, F.P. (2023). Analisis Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4), 2341-2347.
- Trisnawati, Y., & Mulyandari, A. (2023). EDUKASI STUNTING PADA WANITA PRANIKAH DI KAMPUNG WONOSARI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Anugrah Bintang (JPMAB)*, 4(1).
- Databoks.katadata.co.id
 Kesmas.kesmas.go.id
 Ppid.kepriprov.go.id